



Tingkat Kesiapan Tata Kelola Indikasi Geografis dalam Mendukung Ekspor Kopi Arabika Kintamani

L P K Pratiwi¹, A A I A P Dewi², I W Terimajaya³

^{1,2}Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Tabanan

³Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tabanan

E-mail: kiranapратиwi@universitastabanan.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 19, 2025

Accepted October 25, 2025

Keywords:

Geographical Indication,
Export Governance, Kintamani
Arabica Coffee

ABSTRACT

Kintamani Arabica coffee has been certified as a Geographical Indication (GI), serving as an origin-based differentiation instrument in the global specialty coffee market. However, the improvement of export competitiveness has not yet been fully optimized, as GI governance still faces various constraints, particularly in institutional coordination, the implementation of digital traceability, premium price transparency, export contract certainty, and supply chain financing support. This study aims to assess the readiness level of GI governance in supporting the export of Kintamani Arabica coffee based on the perceptions of key stakeholders. The research was conducted in Kintamani District, Bangli Regency, Bali, involving key respondents consisting of Subak Abian farmers, cooperatives/processing units (UPH), GI management board (MPIG), exporters, buyers/roasters, and local government representatives. Data were collected through a five-point Likert scale questionnaire and analyzed using a descriptive quantitative approach by calculating the average scores of governance readiness indicators. The results indicate that the readiness of GI governance falls into a moderate category with a low tendency, suggesting that the governance system has been functioning but has not yet been fully integrated to optimally support specialty coffee exports. The main weaknesses lie in contract-based financing, low transparency in premium price distribution, and limited implementation of lot-based digital traceability. The novelty of this study lies in its quantitative measurement of export-oriented GI governance readiness through a multi-stakeholder perception approach, which remains relatively limited in Indonesian GI coffee research. Policy implications emphasize the importance of strengthening MPIG as a central export coordination hub (single gateway), implementing lot-based digital traceability, developing standardized export contracts, and providing supply chain finance schemes to promote sustainable upgrading of Kintamani coffee exports.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

ABSTRAK



Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 19, 2025

Accepted October 25, 2025

Kata Kunci:Indikasi Geografis, Tata Kelola
Ekspor, Kopi Arabika
Kintamani

Kopi Arabika Kintamani telah tersertifikasi sebagai Indikasi Geografis (IG) yang berperan sebagai instrumen diferensiasi origin dalam pasar kopi *specialty* global. Namun, peningkatan daya saing ekspor belum sepenuhnya optimal karena tata kelola IG masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada koordinasi kelembagaan, penerapan *traceability* digital, transparansi *premium price*, kepastian kontrak ekspor, serta dukungan pembiayaan rantai pasok. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesiapan tata kelola IG dalam mendukung ekspor Kopi Arabika Kintamani berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan utama. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali dengan melibatkan responden kunci yang terdiri atas petani Subak Abian, koperasi/UPH, pengurus MPIG, eksportir, *buyer/roaster*, serta pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala likert lima tingkat dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan skor rata-rata pada setiap indikator kesiapan tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan tata kelola IG berada pada kategori sedang dengan kecenderungan rendah, yang mengindikasikan bahwa sistem tata kelola telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung ekspor kopi *specialty* secara optimal. Kelemahan utama terdapat pada pembiayaan berbasis kontrak, rendahnya transparansi distribusi *premium price*, serta keterbatasan penerapan *traceability* digital berbasis lot. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengukuran kuantitatif kesiapan governance IG ekspor melalui persepsi multi-stakeholder, yang masih relatif terbatas dalam kajian IG kopi di Indonesia. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya penguatan MPIG sebagai pusat koordinasi ekspor (*single gateway*), implementasi *traceability lot-based* berbasis digital, pengembangan kontrak ekspor standar, serta penyediaan skema supply chain finance guna mendorong upgrading ekspor Kopi Arabika Kintamani secara berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

L P K Pratiwi

Universitas Tabanan

Email: kiranapратиwi@universitastabanan.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan kopi global dalam dua dekade terakhir mengalami pergeseran fundamental dari sistem perdagangan berbasis volume menuju pasar premium yang menekankan kualitas sensori, diferensiasi asal geografis (*origin*), serta keberlanjutan produksi. Perkembangan segmen *specialty coffee* menempatkan kopi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas pertanian primer, melainkan sebagai produk bernilai tambah tinggi yang



identitasnya melekat pada reputasi mutu, karakteristik wilayah, serta narasi sosial-ekologis daerah produksi (Anindita & Baladina, 2020; Ponte, 2002; Wahyudi & Jati, 2012). Dalam konteks ini, konsumen internasional semakin menuntut konsistensi kualitas, transparansi rantai pasok, serta jaminan asal geografis yang dapat diverifikasi sebagai prasyarat utama terbentuknya kepercayaan dalam pasar premium (Barham, 2003; Bowen, 2010; Giovannucci & Ponte, 2005). Persaingan ekspor kopi *specialty* semakin intensif seiring meningkatnya standar mutu dan kepatuhan yang diterapkan oleh *buyer* global. Persyaratan tersebut mencakup ketertelusuran (*traceability*), pemenuhan prinsip keberlanjutan rantai pasok, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan sosial (Badia-Melis et al., 2015; Olsen & Borit, 2018; Regattieri et al., 2007). Kondisi ini mendorong negara produsen untuk memperkuat tata kelola ekspor secara lebih terintegrasi agar mampu memenuhi tuntutan pasar global secara konsisten (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002). Namun demikian, kelembagaan ekspor kopi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam koordinasi rantai nilai, kontrak pemasaran, konsistensi mutu, serta mekanisme insentif bagi petani sebagai produsen utama. Situasi ini menunjukkan bahwa integrasi aktor dalam rantai pasok global merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing ekspor kopi nasional (Kaplinsky & Morris, 2001; Neilson et al., 2018; Tregear et al., 2007).

Dalam kerangka tersebut, Indikasi Geografis (IG) dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing ekspor kopi, karena berfungsi melindungi reputasi *origin* sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah melalui *premium price* (Apriansyah, 2018; Ahdiyati, 2025; Hidayat & Suryana, 2018). IG tidak dapat dipahami hanya sebagai sertifikat administratif, melainkan sebagai sistem tata kelola kolektif yang mengatur standar mutu, mekanisme pengawasan, distribusi manfaat ekonomi, serta ketertelusuran produk dalam rantai pasok (Astuti et al., 2021; Belletti et al., 2017; Durand & Fournier, 2017). Dengan demikian, efektivitas IG sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan produsen, kekuatan organisasi pengelola, serta koordinasi antaraktor dalam sistem perdagangan ekspor (Bowen, 2010; Tregear et al., 2007). Namun, implementasi IG di negara berkembang kerap menghadapi kendala struktural sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen *upgrading* ekonomi dan pembangunan pedesaan. Kelemahan umum mencakup rendahnya kapasitas kelembagaan pengelola, lemahnya koordinasi kolektif, distribusi *premium* yang tidak transparan, serta keterbatasan adopsi sistem ketertelusuran modern (Belletti et al., 2017; Durand & Fournier, 2017; Hartati, 2016). Fragmentasi rantai pasok menyebabkan manfaat ekonomi IG belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, sementara nilai tambah lebih banyak dinikmati pada level hilir perdagangan (Giovannucci & Ponte, 2005; Neilson et al., 2018). Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan integrasi pasar menjadi agenda utama dalam pengembangan produk IG berbasis komoditas pertanian di Indonesia (Apriansyah, 2018; Astuti et al., 2021).

Sejalan dengan tuntutan pasar premium, sistem *traceability* menjadi elemen krusial dalam mendukung kredibilitas IG dan memperkuat kepercayaan konsumen internasional. Perkembangan teknologi digital seperti *blockchain* dan Internet of Things (IoT) menawarkan peluang integrasi ketertelusuran yang lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik (Galvez et al., 2018; Kamble et al., 2020). Sistem ini semakin relevan mengingat pasar global menuntut jaminan asal produk yang dapat dibuktikan secara objektif melalui sistem



informasi rantai pasok (Badia-Melis et al., 2015; Regattieri et al., 2007). Selain aspek ketertelusuran, keterbatasan akses pembiayaan rantai pasok juga menjadi hambatan signifikan dalam penguatan daya saing kopi IG. Petani dan pelaku usaha kopi di negara berkembang sering menghadapi kesenjangan pendanaan yang membatasi investasi pada mutu, sertifikasi, dan inovasi pemasaran ekspor (Hofmann & Belin, 2011; Pfohl et al., 2011). Konsep *supply chain finance* dipandang sebagai solusi strategis untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan dalam perdagangan agribisnis global (Gelsomino et al., 2016; More & Basu, 2013; Wuttke et al., 2013). Oleh karena itu, tata kelola IG yang kuat memerlukan dukungan integrasi kelembagaan, sistem pembiayaan berbasis kontrak, serta penguatan aliran finansial dalam rantai pasok ekspor (Caniato et al., 2016; Hofmann & Belin, 2011).

Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen kopi dengan beragam *origin* unggulan yang dikenal di pasar dunia. Namun ekspor kopi nasional masih didominasi produk *green bean* dengan nilai tambah terbatas, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan petani relatif belum optimal (Anindita & Baladina, 2020; Wahyudi & Jati, 2012). Walaupun beberapa kopi Indonesia telah memperoleh sertifikasi IG, implementasinya belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan daya saing ekspor secara terintegrasi (Hidayat & Suryana, 2018; Neilson et al., 2018). Kopi Arabika Kintamani merupakan kopi IG pertama di Indonesia yang memiliki reputasi global dalam pasar *specialty coffee*. Sertifikasi IG Kintamani menjadi simbol penting dalam diferensiasi *origin* kopi Bali (Dewi & Suamba, 2019). Namun demikian, ekspor kopi Kintamani masih menghadapi tantangan dalam tata kelola kelembagaan MPIG, transparansi distribusi *premium price*, pembiayaan berbasis kontrak, serta penerapan *traceability* digital yang belum terintegrasi (Dewi & Suamba, 2019; Hartati, 2016). Selain itu, ancaman perubahan iklim turut mempengaruhi keberlanjutan produksi kopi dan daya saing komunitas kopi berbasis IG (Schroth et al., 2009). Kajian IG kopi di Indonesia umumnya masih bersifat deskriptif dan lebih menekankan aspek legalitas sertifikasi atau kelembagaan secara umum (Ahdiyati, 2025; Apriansyah, 2018). Penelitian yang mengukur tingkat kesiapan tata kelola IG secara kuantitatif berbasis persepsi multi-*stakeholder* masih terbatas, padahal pengukuran kesiapan merupakan dasar penting dalam merumuskan agenda penguatan kelembagaan ekspor yang lebih operasional, terukur, dan sesuai tuntutan pasar global (Belletti et al., 2017; Sugiyono, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan melalui pengukuran tingkat kesiapan tata kelola Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani dalam mendukung ekspor, serta perumusan rekomendasi kebijakan penguatan daya saing *origin* secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan reputasi *origin* dan peningkatan daya saing kopi *specialty* Indonesia di pasar global. Namun, efektivitas IG dalam mendukung ekspor sangat bergantung pada kesiapan tata kelola kelembagaan, sistem mutu, ketertelusuran, distribusi nilai tambah, serta dukungan pembiayaan rantai pasok. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesiapan tata kelola Indikasi Geografis dalam mendukung ekspor Kopi Arabika Kintamani?



2. Aspek tata kelola apa saja yang masih menjadi kelemahan utama dalam sistem pengelolaan IG Kopi Arabika Kintamani?
3. Implikasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat tata kelola IG dalam mendukung ekspor Kopi Arabika Kintamani secara berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat kesiapan tata kelola Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani dalam mendukung aktivitas ekspor kopi specialty.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek tata kelola IG yang masih menjadi kelemahan utama dalam sistem ekspor Kopi Arabika Kintamani.
3. Merumuskan implikasi kebijakan strategis untuk memperkuat tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani dalam meningkatkan daya saing ekspor secara berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tata kelola Indikasi Geografis, khususnya terkait pengukuran tingkat kesiapan governance IG dalam mendukung ekspor kopi *specialty* berbasis origin.

2. Manfaat Praktis bagi Stakeholder

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi MPIG, koperasi/ UPH, eksportir, serta pemerintah daerah dalam memahami aspek-aspek tata kelola yang masih lemah dan membutuhkan penguatan untuk meningkatkan daya saing ekspor Kopi Arabika Kintamani.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini menyediakan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih terukur terkait transparansi *premium price*, penguatan traceability digital, pengembangan kontrak ekspor standar, serta pembiayaan rantai pasok berbasis *supply chain finance* guna mendorong upgrading ekspor secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pada periode Juli hingga September 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah Kintamani merupakan pusat produksi utama sekaligus kawasan pengembangan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani yang telah dikenal dalam pasar kopi specialty. Lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji kesiapan tata kelola IG dalam mendukung aktivitas ekspor kopi berbasis origin. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert kepada para stakeholder kunci, serta dilengkapi dengan wawancara singkat untuk memperkuat pemahaman konteks tata kelola



ekspor. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kelembagaan MPIG, laporan koperasi atau Unit Pengolahan Hasil (UPH), serta literatur ilmiah terkait tata kelola IG dan ekspor kopi.

Populasi penelitian mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam sistem tata kelola Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 30 orang, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki peran strategis dalam pengelolaan IG dan rantai pasok ekspor. Responden terdiri atas petani Subak Abian (10 orang), pengelola koperasi/UPH (6 orang), pengurus MPIG (4 orang), eksportir kopi (4 orang), buyer atau roaster (3 orang), serta pemerintah daerah atau lembaga pendukung terkait (3 orang). Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyebaran kuesioner skala Likert untuk memperoleh persepsi responden mengenai kondisi tata kelola IG dalam mendukung ekspor. Selain itu, wawancara singkat dilakukan secara terbatas kepada responden kunci guna memperdalam informasi terkait kendala kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta praktik pemasaran ekspor yang berjalan. Data juga dilengkapi dengan dokumentasi dan studi literatur yang bersumber dari laporan MPIG, dokumen koperasi/UPH, serta referensi ilmiah terkait pengembangan Indikasi Geografis dan tata kelola ekspor kopi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung rata-rata skor pada setiap butir pertanyaan. Skor rata-rata tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kesiapan tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam mendukung ekspor secara berkelanjutan. Berikut rumus perhitungan skor likert.

1. Skor Rata-rata Jawaban Responden

Skor dihitung menggunakan nilai rata-rata dari seluruh jawaban responden berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan:

- $\bar{x}$ = skor rata-rata
- Σ = total skor seluruh responden
- n = jumlah responden

2. Skor Rata-rata Keseluruhan

Beberapa butir pertanyaan, maka skor rata-rata keseluruhan dihitung berikut:

$$M = \sum_{j=1}^k \bar{X}_j$$

Keterangan:

- M = skor rata-rata keseluruhan
- $\bar{X}_j$ = skor rata-rata pada butir pertanyaan ke-j
- k = jumlah butir pertanyaan

Tabel 1. Skala Penilaian Likert

Skor Rata-rata (Mean)	Kategori	Interpretasi Umum
1,00 – 1,80	Sangat Rendah	Kondisi sangat lemah / belum berjalan



Skor Rata-rata (Mean)	Kategori	Interpretasi Umum
1,81 – 2,60	Rendah	Kondisi masih kurang memadai
2,61 – 3,40	Sedang	Kondisi cukup berjalan namun perlu penguatan
3,41 – 4,20	Tinggi	Kondisi sudah baik dan berjalan efektif
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi	Kondisi sangat baik dan optimal

Sumber: Sugiyono, 2019

Penelitian ini menggunakan skala Likert lima tingkat untuk mengukur persepsi responden. Skor 1 menunjukkan penilaian sangat rendah, sedangkan skor 5 menunjukkan penilaian sangat tinggi. Data dianalisis dengan menghitung skor rata-rata dari seluruh jawaban responden. Hasil rata-rata tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat kesiapan berdasarkan interval skor yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Kesiapan Tata Kelola IG

Indikasi Geografis (IG) pada kopi *specialty* tidak hanya berfungsi melindungi reputasi *origin*, tetapi juga menjadi mekanisme tata kelola kolektif yang mengatur standar mutu, koordinasi kelembagaan, serta distribusi manfaat ekonomi dalam rantai pasok ekspor (Belletti et al., 2017; Astuti et al., 2021). Keberhasilan IG sangat ditentukan oleh kapasitas institusi pengelola dan efektivitas koordinasi antaraktor dalam menjaga konsistensi mutu serta membangun kepercayaan buyer (Hidayat & Suryana, 2018; Neilson et al., 2018). Penelitian ini mengukur kesiapan tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan utama, meliputi petani Subak Abian, koperasi/UPH, MPIG, eksportir, buyer/roaster, serta pemerintah daerah. Tingkat kesiapan diukur melalui enam indikator, yaitu kelembagaan dan koordinasi, standarisasi mutu, *traceability*, transparansi *premium price*, kontrak ekspor, dan pembiayaan rantai pasok. Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran aspek kelembagaan dan koordinasi sebagai fondasi utama tata kelola IG sebagai berikut.

Tabel 2. Kelembagaan dan Koordinasi (*Institutional Coordination*)

No	Indikator	Skor	Kategori
1	MPIG berfungsi aktif sebagai lembaga pengelola IG	2,90	Sedang
2	Koordinasi petani, koperasi, eksportir berjalan baik	2,70	Sedang
3	Pembagian peran antar aktor jelas	2,60	Sedang
4	Aturan internal dipatuhi bersama	2,80	Sedang
Rata-rata Aspek Kelembagaan dan Koordinasi		2,75	Sedang

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 2, aspek kelembagaan dan koordinasi memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa MPIG Kopi Arabika Kintamani telah berfungsi sebagai lembaga formal pengelola IG, namun perannya sebagai pusat koordinasi ekspor (*export governance hub*) belum sepenuhnya optimal. MPIG sudah menjalankan fungsi dasar seperti menjaga legalitas IG dan melakukan pembinaan umum, tetapi



belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan seluruh aktor rantai pasok ekspor dalam satu sistem tata kelola kolektif yang solid. Koordinasi antar petani, koperasi/UPH, eksportir, buyer, serta pemerintah daerah masih berjalan parsial, sehingga tata kelola ekspor belum terbangun dalam bentuk jaringan kelembagaan yang kuat dan terstandarisasi. Kelembagaan IG pada dasarnya menuntut kerja kolektif karena reputasi *origin* tidak dapat dijaga secara individual, melainkan melalui sistem pengaturan bersama yang mencakup standar mutu, mekanisme pengawasan, serta distribusi manfaat ekonomi (Belletti et al., 2017; Tregear et al., 2007). Astuti et al. (2021) menegaskan bahwa tantangan utama IG di Indonesia terletak pada kelembagaan yang sering kali masih berorientasi administratif sertifikasi, sehingga belum berkembang menjadi institusi kolektif yang mampu mengatur mekanisme pasar dan ekspor secara efektif. Kondisi kelembagaan yang belum optimal ini juga dipengaruhi oleh kompleksitas aktor dalam rantai pasok kopi Kintamani. Banyaknya kelompok petani Subak Abian, variasi kapasitas koperasi/UPH, serta keterlibatan pedagang dan eksportir dengan kepentingan berbeda menyebabkan konsolidasi rantai pasok menjadi sulit. Dewi dan Suamba (2019) menunjukkan bahwa kelembagaan kopi Kintamani masih menghadapi tantangan dalam menyatukan kepentingan petani dan pelaku perdagangan, terutama terkait pengelolaan mutu, pemasaran ekspor, dan pembagian *premium price*. Fragmentasi koordinasi ini berpotensi melemahkan posisi tawar *origin*, karena dalam rantai nilai kopi global, kemampuan wilayah asal dalam menangkap nilai tambah sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola kelembagaan dan koordinasi antaraktor (Neilson et al., 2018; Giovannucci & Ponte, 2005). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan MPIG menjadi agenda strategis agar tata kelola IG Kintamani lebih terkoordinasi dan mampu meningkatkan daya saing ekspor di pasar *specialty coffee* global.

Tabel 3. Standarisasi Mutu dan Pengendalian Kualitas (*Quality Control System*)

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
1	SOP budidaya dan pascapanen diterapkan konsisten	3,30	Sedang
2	UPH memiliki kontrol mutu yang memadai	3,20	Sedang
3	Mutu kopi antar lot relatif seragam	3,00	Sedang
4	Sertifikasi mutu mendukung ekspor <i>specialty</i>	3,10	Sedang
Rata-rata Aspek Standarisasi Mutu dan QC		3,15	Sedang

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa aspek standarisasi mutu dan *quality control* memperoleh skor rata-rata 3,15 dengan kategori sedang dan menjadi kekuatan relatif dalam tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani. Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan SOP budidaya dan pascapanen telah berjalan cukup konsisten di tingkat petani dan koperasi, serta unit pengolahan hasil (UPH) telah memiliki mekanisme pengendalian mutu yang mendukung kebutuhan pasar ekspor *specialty*. Keberadaan standar mutu yang jelas merupakan fondasi utama dalam sistem IG karena reputasi *origin* sangat ditentukan oleh kemampuan produsen menjaga kualitas produk secara kolektif dan berkelanjutan (Belletti et al., 2017; Tregear et al., 2007). Dalam pasar *specialty coffee*, standar mutu menjadi semakin krusial karena buyer internasional menilai kopi tidak hanya berdasarkan volume, tetapi juga konsistensi cita rasa, keseragaman *grade*, skor cupping, serta minimnya cacat pascapanen (Anindita & Baladina, 2020;



Giovannucci & Ponte, 2005). Sistem *quality control* yang berjalan pada level UPH berperan sebagai filter utama untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor memenuhi standar premium dan mampu menjaga kepercayaan buyer (Bowen, 2010; Neilson et al., 2018).

Skor mutu antar *lot* produksi yang berada pada kategori sedang (3,0) menunjukkan bahwa variasi kualitas masih terjadi dalam sistem produksi Kopi Arabika Kintamani. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan praktik budidaya antar petani, heterogenitas penerapan teknologi pascapanen, serta keterbatasan fasilitas pengolahan dan penyimpanan di beberapa kelompok tani. Kondisi ini berpotensi melemahkan reputasi *origin* apabila buyer menemukan ketidakkonsistenan mutu pada pengiriman *lot* yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan keberlanjutan kontrak ekspor (Giovannucci & Ponte, 2005; Neilson et al., 2018). Penguatan kualitas ekspor Kopi Arabika Kintamani memerlukan peningkatan kapasitas UPH sebagai pusat *quality assurance*, termasuk pelatihan grading dan cupping, investasi peralatan pascapanen, serta harmonisasi SOP antar Subak Abian agar standar produksi menjadi lebih seragam. Dalam kerangka tata kelola IG, standarisasi mutu tidak hanya berfungsi sebagai aspek teknis produksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga reputasi *origin* dan memperkuat posisi tawar Kintamani dalam pasar *specialty coffee* global.

Tabel 4. Traceability dan Sistem Ketertelusuran (*Digital Traceability Readiness*)

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
1	Produk kopi dapat ditelusuri sampai petani/lot	2,60	Sedang
2	Data produksi dan pascapanen tercatat rapi	2,50	Sedang
3	Sistem QR/digital mulai diterapkan	2,40	Rendah
4	Buyer percaya pada asal-usul kopi Kintamani	2,70	Sedang
Rata-rata Aspek <i>Traceability</i> Digital		2,55	Sedang

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Aspek *traceability* digital pada Tabel 4 memperoleh skor rata-rata 2,55 dengan kategori sedang, namun menunjukkan kelemahan utama pada penerapan sistem QR atau *digital lot-based* yang masih rendah (2,4). Temuan ini mengindikasikan bahwa ketertelusuran Kopi Arabika Kintamani masih berada pada tahap awal dan cenderung bersifat semi-manual, sehingga belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem digital yang dapat diverifikasi secara kuat oleh buyer internasional. Pencatatan produksi dan pascapanen memang mulai dilakukan, tetapi belum terintegrasi dalam satu platform kolektif yang dikelola MPIG sebagai lembaga pengampu IG. Akibatnya, informasi asal-usul kopi masih bergantung pada dokumentasi internal koperasi atau eksportir, bukan pada sistem *traceability* formal berbasis *origin*. Padahal, *traceability* merupakan komponen kunci dalam rantai pasok pangan modern untuk menjamin transparansi asal-usul produk dan kepastian mutu dalam perdagangan global (Olsen & Borit, 2018; Regattieri et al., 2007; Badia-Melis et al., 2015).

Ketertelusuran menjadi tuntutan utama dalam pasar *specialty coffee* karena buyer membutuhkan jaminan asal produk hingga tingkat petani dan *lot* produksi, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan regulasi internasional (Giovannucci & Ponte, 2005; Neilson et al., 2018). Perkembangan teknologi digital seperti *blockchain* dan



IoT menawarkan peluang penguatan *traceability* melalui sistem lot-based dan QR code yang lebih transparan, terdokumentasi, dan akuntabel (Galvez et al., 2018; Kamble et al., 2020). Dalam kerangka Indikasi Geografis, *traceability* digital seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat reputasi *origin* dan membangun *trust* buyer secara kolektif (Belletti et al., 2017; Astuti et al., 2021). Oleh karena itu, integrasi sistem *traceability* berbasis QR dan *lot tracking* yang dikelola secara kelembagaan oleh MPIG perlu diprioritaskan sebagai agenda penguatan tata kelola ekspor Kopi Arabika Kintamani agar sertifikasi IG memiliki kredibilitas yang dapat diverifikasi dalam pasar kopi premium global.

Tabel 5. Transparansi Premium Price dan Distribusi Nilai Tambah (*Price Transparency*)

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
1	Harga premium diketahui petani dan koperasi	2,30	Rendah
2	Mekanisme pembagian premium transparan	2,20	Rendah
3	Petani menerima manfaat ekonomi dari IG	2,40	Rendah
4	Tidak ada konflik dalam distribusi nilai tambah	2,50	Sedang
Rata-rata Aspek Transparansi <i>Premium Price</i>		2,35	Rendah

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa transparansi *premium price* memperoleh skor rata-rata 2,35 dengan kategori rendah dan menjadi kelemahan paling dominan dalam tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan harga premium serta distribusi nilai tambah dalam rantai ekspor belum berjalan secara terbuka dan terinstitusionalisasi. Petani dan koperasi belum sepenuhnya mengetahui besaran *premium price* yang diterima pada level buyer atau eksportir, sehingga manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi insentif utama dari sertifikasi IG belum dirasakan secara jelas oleh produsen di tingkat hulu. Transparansi premium merupakan elemen penting dalam sistem IG karena *premium price* menjadi pembeda utama antara produk *origin specialty* dengan kopi komersial biasa. Dalam tata kelola IG yang kuat, distribusi nilai tambah seharusnya dibangun melalui mekanisme kolektif yang jelas dan adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh petani sebagai penjaga reputasi *origin* (Belletti et al., 2017; Tregear et al., 2007).

Rendahnya transparansi *premium price* menunjukkan bahwa nilai tambah dalam rantai pasok kopi IG masih cenderung terkonsentrasi pada level hilir perdagangan. Neilson et al. (2018) menegaskan bahwa dalam sektor kopi Indonesia, sertifikasi IG tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan petani apabila mekanisme *value capture* tidak dikelola secara transparan dan kolektif. Giovannucci dan Ponte (2005) juga menunjukkan bahwa standar dan diferensiasi pasar premium sering kali menghasilkan distribusi manfaat yang tidak seimbang ketika posisi tawar produsen lemah. Ketidakjelasan pembagian manfaat berpotensi melemahkan kepercayaan petani terhadap kelembagaan pengelola serta menurunkan motivasi untuk mempertahankan standar mutu IG secara konsisten (Astuti et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan transparansi *premium price* melalui sistem pencatatan terbuka, mekanisme pembagian manfaat yang disepakati bersama, serta penguatan kelembagaan MPIG menjadi agenda strategis agar IG Kopi Arabika Kintamani benar-benar mampu mendorong *upgrading* ekonomi dan meningkatkan daya saing ekspor secara berkelanjutan.

Tabel 6. Kontrak Ekspor dan Kepastian Transaksi (*Export Contract Readiness*)

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
1	Ada kontrak ekspor standar yang digunakan	2,60	Sedang
2	Volume dan kualitas disepakati jelas	2,80	Sedang
3	Jadwal pembayaran dan pengiriman pasti	2,50	Sedang
4	Hubungan buyer–origin bersifat jangka panjang	2,70	Sedang
Rata-rata Aspek Kontrak Ekspor		2,65	Sedang

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kesiapan kontrak ekspor berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 2,65. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme transaksi ekspor Kopi Arabika Kintamani telah memiliki kesepakatan dasar terkait volume dan kualitas produk, namun kontrak ekspor standar belum sepenuhnya diterapkan secara formal dan terinstitusionalisasi. Kesepakatan perdagangan masih banyak bergantung pada hubungan personal atau negosiasi sesaat, sehingga belum membentuk sistem kontraktual yang kuat sebagai bagian dari tata kelola IG ekspor. Keterbatasan penerapan kontrak standar berimplikasi pada rendahnya kepastian transaksi dalam rantai pasok ekspor, terutama terkait stabilitas harga, jadwal pengiriman, serta keberlanjutan hubungan buyer–origin. Dalam rantai nilai global, tata kelola kontraktual merupakan elemen penting untuk memperkuat koordinasi antaraktor dan meningkatkan posisi tawar produsen di tingkat hulu (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002).

Ketiadaan kontrak ekspor yang terstandarisasi juga membatasi peluang origin untuk membangun relasi jangka panjang dengan buyer *specialty*, karena pasar premium menuntut kepastian mutu, kontinuitas pasokan, serta komitmen kerja sama yang jelas (Giovannucci & Ponte, 2005; Neilson et al., 2018). Dalam sistem IG yang matang, kontrak ekspor formal seharusnya menjadi instrumen strategis untuk mengamankan *premium price*, menjamin konsistensi mutu, serta memperkuat reputasi *origin* dalam perdagangan internasional (Belletti et al., 2017; Tregear et al., 2007). Selain itu, kontrak ekspor juga dapat menjadi dasar pengembangan pembiayaan berbasis kontrak (*contract-based financing*) melalui pendekatan *supply chain finance* yang mendukung investasi mutu dan pascapanen (Hofmann & Belin, 2011; Wuttke et al., 2013). Oleh karena itu, penguatan kontrak ekspor yang terintegrasi dengan peran MPIG sebagai pusat koordinasi menjadi agenda penting untuk meningkatkan kepastian transaksi sekaligus mendorong *upgrading* ekspor Kopi Arabika Kintamani secara berkelanjutan.

Tabel 7. Pembiayaan dan Dukungan *Supply Chain Finance* (*Financing Support*)

No	Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
1	Petani/koperasi mendapat akses pembiayaan	2,20	Rendah
2	Ada skema pembiayaan berbasis kontrak	2,10	Rendah
3	Modal cukup untuk investasi pascapanen	2,30	Rendah
4	Pemerintah/lembaga keuangan mendukung ekspor	2,50	Sedang



No Indikator	Skor Rata-rata	Kategori
Rata-rata Aspek Pembiayaan Rantai Pasok	2,28	Rendah

Sumber: Data Diolah Primer, 2025

Hasil pada Tabel 7 menunjukkan bahwa aspek pembiayaan rantai pasok memperoleh skor rata-rata 2,28 dengan kategori rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa petani dan koperasi Kopi Arabika Kintamani masih menghadapi keterbatasan akses modal yang memadai untuk mendukung aktivitas *upgrading* ekspor. Pembiayaan menjadi faktor krusial karena pasar *specialty coffee* menuntut investasi berkelanjutan, terutama pada peningkatan fasilitas pascapanen, penguatan *quality control*, sertifikasi mutu, serta penerapan *traceability* digital. Rendahnya dukungan pembiayaan menyebabkan petani dan koperasi kesulitan memenuhi standar buyer internasional secara konsisten, sehingga daya saing ekspor *origin* Kintamani belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa skema pendanaan yang tersedia belum terintegrasi dengan kebutuhan tata kelola IG dan sistem perdagangan ekspor secara efektif (Hofmann & Belin, 2011; Pfohl et al., 2011).

Keterbatasan pembiayaan ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar petani masih mengandalkan modal pribadi atau pembiayaan informal dengan biaya tinggi, sementara koperasi menghadapi hambatan akses kredit untuk pengadaan teknologi pascapanen dan penyimpanan. Dalam konteks rantai pasok agribisnis global, *supply chain finance* dipandang sebagai mekanisme strategis untuk menjembatani kesenjangan pendanaan, meningkatkan kepastian modal kerja, serta mengurangi risiko transaksi melalui pembiayaan berbasis kontrak ekspor (Gelsomino et al., 2016; Wuttke et al., 2013; More & Basu, 2013). Namun, ketika kontrak ekspor belum terstandarisasi dan akses lembaga keuangan masih terbatas, pembiayaan berbasis kontrak sulit diterapkan secara optimal. Akibatnya, investasi pada inovasi teknologi, penguatan *traceability* digital, dan peningkatan fasilitas pengolahan menjadi terhambat, sehingga posisi petani dalam rantai pasok tetap lemah dan distribusi nilai tambah IG belum merata (Caniato et al., 2016; Neilson et al., 2018). Oleh karena itu, pengembangan skema pembiayaan rantai pasok yang terintegrasi dengan kelembagaan MPIG menjadi agenda strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor Kopi Arabika Kintamani dan meningkatkan kesejahteraan produsen secara lebih berkelanjutan.

Tabel 8. Rekapitulasi Tingkat Kesiapan Tata Kelola IG Ekspor

Aspek Tata Kelola IG Ekspor	Skor Rata-rata	Kategori
Kelembagaan dan Koordinasi	2,75	Sedang
Standarisasi Mutu dan QC	3,15	Sedang
Traceability Digital	2,55	Sedang
Transparansi Premium Price	2,35	Rendah
Kontrak Ekspor	2,65	Sedang
Pembiayaan Rantai Pasok	2,28	Rendah
Indeks Total Kesiapan IG Ekspor	2,62	Sedang

Sumber: Data Diolah Primer, 2025



Indeks kesiapan tata kelola Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani secara keseluruhan berada pada kategori sedang dengan skor 2,62. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola IG telah memiliki fondasi awal dalam mendukung ekspor kopi *specialty*, terutama pada aspek standarisasi mutu dan pengendalian kualitas yang menjadi kekuatan relatif. Penerapan SOP budidaya dan pascapanen di tingkat petani serta keberadaan UPH sebagai pusat kontrol mutu memberikan dukungan penting bagi konsistensi produk ekspor dan menjaga reputasi *origin* Kintamani dalam pasar premium (Belletti et al., 2017; Tregear et al., 2007; Anindita & Baladina, 2020). Meskipun demikian, kelemahan struktural masih terlihat pada aspek transparansi *premium price* dan pembiayaan rantai pasok. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi nilai tambah IG belum berjalan secara adil dan mekanisme pembagian manfaat ekonomi belum terinstitusionalisasi secara transparan (Neilson et al., 2018; Giovannucci & Ponte, 2005). Keterbatasan akses modal petani maupun koperasi juga membatasi kemampuan untuk melakukan investasi dalam *upgrading* pascapanen, sertifikasi, serta penguatan mutu yang dibutuhkan untuk memenuhi standar buyer *specialty* secara berkelanjutan (Hofmann & Belin, 2011; Gelsomino et al., 2016).

Kesiapan *traceability* digital juga masih berada pada tahap awal sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan buyer global yang semakin menekankan ketertelusuran, transparansi, dan kepatuhan keberlanjutan dalam rantai pasok kopi premium (Olsen & Borit, 2018; Badia-Melis et al., 2015). Kondisi ini berpotensi mengurangi *trust* buyer terhadap *origin* Kintamani apabila sistem *lot-based* dan digitalisasi data belum terintegrasi secara menyeluruh, padahal teknologi seperti *blockchain* dan IoT menawarkan peluang penguatan ketertelusuran yang lebih akuntabel (Galvez et al., 2018; Kamble et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan tata kelola IG tidak hanya memerlukan perbaikan teknis pada level produksi, tetapi juga transformasi kelembagaan dan sistem perdagangan agar IG benar-benar berfungsi sebagai mekanisme *upgrading* ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani (Astuti et al., 2021; Belletti et al., 2017). Agenda utama penguatan *governance* IG Kopi Arabika Kintamani perlu difokuskan pada empat prioritas strategis, yaitu penguatan peran MPIG sebagai pusat koordinasi ekspor, penerapan *traceability* digital berbasis *lot*, pengembangan kontrak ekspor standar untuk meningkatkan kepastian transaksi dalam rantai nilai global (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002), serta penyediaan skema *supply chain finance* berbasis kontrak guna mendukung investasi mutu dan inovasi pascapanen (Wuttke et al., 2013; Pfohl et al., 2011). Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk mendorong *upgrading* ekspor Kopi Arabika Kintamani secara berkelanjutan dalam pasar *specialty coffee* global.

3.2 Kendala Internal dan Eksternal Tata Kelola IG

3.2.1 Kendala Internal Tata Kelola IG

Kendala internal dalam tata kelola Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani merupakan hambatan yang berasal dari dalam sistem kelembagaan *origin*, meliputi MPIG, petani Subak Abian, koperasi/UPH, serta aktor lokal dalam rantai pasok ekspor. Kendala ini tercermin dari dimensi tata kelola yang memperoleh skor rendah, khususnya pada aspek transparansi distribusi nilai tambah dan dukungan pembiayaan.



Aspek transparansi *premium price* memperoleh skor rata-rata 2,35 dengan kategori rendah dan menjadi kendala internal paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian nilai tambah dari sertifikasi IG belum berjalan secara terbuka, sehingga manfaat ekonomi IG belum sepenuhnya dirasakan oleh produsen di tingkat hulu. Kondisi ini sejalan dengan temuan Neilson et al. (2018) bahwa sertifikasi IG tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila mekanisme *value capture* masih terkonsentrasi pada level hilir perdagangan. Giovannucci dan Ponte (2005) juga menegaskan bahwa diferensiasi pasar premium sering menghasilkan distribusi manfaat yang tidak seimbang ketika posisi tawar produsen lemah. Rendahnya transparansi premium berpotensi menurunkan motivasi petani untuk mempertahankan standar mutu dan kepatuhan terhadap aturan IG secara konsisten (Astuti et al., 2021).

Aspek pembiayaan rantai pasok memperoleh skor rata-rata 2,28 dengan kategori rendah, yang mencerminkan keterbatasan akses modal bagi petani dan koperasi untuk melakukan investasi pascapanen dan peningkatan mutu. Dalam konteks agribisnis global, kesenjangan pendanaan menjadi hambatan utama dalam mendukung *upgrading* rantai pasok, sehingga pendekatan *supply chain finance* dipandang relevan untuk menjembatani kebutuhan modal kerja dan mengurangi risiko transaksi (Hofmann & Belin, 2011; Gelsomino et al., 2016; More & Basu, 2013).

Pada aspek kesiapan *traceability* digital, skor rata-rata 2,55 menunjukkan bahwa sistem ketertelusuran kopi Kintamani masih belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh. Penerapan sistem berbasis *lot* dan QR code masih terbatas, sehingga asal-usul produk belum sepenuhnya dapat diverifikasi buyer internasional. Padahal, ketertelusuran merupakan komponen penting dalam sistem pangan modern untuk menjamin transparansi rantai pasok dan kredibilitas *origin* (Olsen & Borit, 2018; Regattieri et al., 2007).

Dalam aspek koordinasi kelembagaan, MPIG memperoleh skor rata-rata 2,75 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa MPIG telah berfungsi sebagai lembaga formal pengelola IG, namun belum sepenuhnya menjadi institusi kolektif yang mampu mengintegrasikan seluruh aktor ekspor dalam satu sistem tata kelola yang solid. Astuti et al. (2021) menegaskan bahwa kelembagaan IG di Indonesia sering kali masih berorientasi administratif sertifikasi dan belum berkembang menjadi institusi kolektif pengatur mekanisme pasar dan ekspor secara efektif. Dewi dan Suamba (2019) juga menunjukkan bahwa kelembagaan kopi Kintamani masih menghadapi tantangan dalam koordinasi mutu dan pemasaran ekspor.

3.2.2 Kendala Eksternal Tata Kelola IG

Kendala eksternal dalam tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani berasal dari dinamika pasar global, tuntutan regulasi internasional, serta meningkatnya kompetisi antar *origin coffee* di pasar *specialty*. Lingkungan eksternal ini memberikan tekanan yang semakin besar karena pasar premium tidak hanya menilai kopi berdasarkan kualitas sensori, tetapi juga berdasarkan transparansi rantai pasok, ketertelusuran produk, serta kepatuhan keberlanjutan (Giovannucci & Ponte, 2005; Bowen, 2010).

Tuntutan buyer internasional terhadap *traceability* menjadi kendala eksternal yang signifikan karena buyer mensyaratkan kopi dapat ditelusuri hingga tingkat petani dan *lot*



produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ketidaksiapan sistem ketertelusuran dapat menurunkan akses kopi *origin* Indonesia ke pasar premium yang semakin ketat dan berbasis audit (Badia-Melis et al., 2015; Olsen & Borit, 2018). Perkembangan teknologi seperti *blockchain* dan IoT juga memperkuat standar global dalam sistem ketertelusuran digital (Galvez et al., 2018; Kamble et al., 2020).

Kompetisi global antar *origin coffee* semakin meningkat karena banyak negara produsen telah mengembangkan tata kelola *origin* yang lebih matang, termasuk kontrak ekspor terstandarisasi, sistem ketertelusuran yang kuat, serta distribusi premium yang lebih transparan. Kondisi ini menekan posisi tawar kopi Kintamani apabila tata kelola IG belum terintegrasi secara optimal dalam pasar *specialty* global (Neilson et al., 2018; Belletti et al., 2017).

Risiko eksternal juga diperkuat oleh volatilitas pasar kopi global serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi stabilitas produksi dan pendapatan petani. Schroth et al. (2009) menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman utama bagi komunitas kopi dan membutuhkan strategi adaptasi yang terintegrasi. Kendala eksternal ini menunjukkan bahwa tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani harus diperkuat agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar global yang semakin kompetitif dan regulatif, serta menjaga daya saing *origin* dalam perdagangan kopi internasional.

3.3. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dalam penguatan tata kelola Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani perlu diarahkan secara lebih terukur pada aspek-aspek yang masih lemah dalam mendukung ekspor kopi *specialty*. Tata kelola IG tidak hanya berkaitan dengan perlindungan reputasi *origin* secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sistem kolektif yang mengatur standar mutu, ketertelusuran rantai pasok, distribusi manfaat ekonomi, serta kepastian transaksi ekspor. Penguatan kebijakan menjadi krusial karena keberhasilan IG dalam pasar premium sangat ditentukan oleh kemampuan *origin* membangun *trust buyer* melalui transparansi dan *governance* yang terintegrasi. Kebijakan yang tidak menyentuh kelemahan struktural berisiko membuat IG berhenti sebagai sertifikasi administratif tanpa menghasilkan upgrading ekonomi bagi petani. Agenda kebijakan strategis perlu difokuskan pada institusionalisasi transparansi *premium price* agar nilai tambah kopi IG dapat diterima secara lebih adil oleh petani dan koperasi. Mekanisme monitoring harga premium, sistem distribusi manfaat berbasis mutu, serta keterbukaan informasi harga di tingkat produsen menjadi instrumen penting untuk menjaga insentif petani dalam mempertahankan standar kualitas *origin*. Transparansi premium juga berperan dalam mengurangi potensi konflik internal serta memperkuat legitimasi IG sebagai sistem kesejahteraan kolektif, bukan sekadar label reputasi pasar.

Penguatan kebijakan juga perlu diarahkan pada pengembangan skema pembiayaan rantai pasok berbasis kontrak ekspor untuk mendukung investasi mutu dan inovasi pascapanen. Akses modal yang memadai memungkinkan koperasi dan petani meningkatkan fasilitas pengolahan, sertifikasi, serta penerapan teknologi yang dibutuhkan dalam pasar *specialty coffee*. Skema *supply chain finance* berbasis kontrak dapat memberikan kepastian modal kerja sekaligus mengurangi risiko fluktuasi harga, sehingga petani dan koperasi memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan upgrading produksi secara berkelanjutan. Kebijakan prioritas lainnya mencakup penerapan *traceability digital* berbasis lot dan QR code guna meningkatkan



transparansi rantai pasok serta memenuhi tuntutan buyer global terkait ketertelusuran dan *compliance* regulasi keberlanjutan seperti EUDR. *Traceability* yang terintegrasi secara digital akan memperkuat reputasi origin Kintamani dan meningkatkan kredibilitas IG dalam pasar premium. Penguatan MPIG sebagai *single export gateway* juga menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi ekspor kolektif, standarisasi kontrak ekspor, serta integrasi tata kelola antar aktor rantai pasok. Langkah-langkah kebijakan tersebut diperlukan agar IG Kopi Arabika Kintamani mampu meningkatkan posisi tawar origin, memperluas akses pasar *specialty*, serta mendorong daya saing ekspor yang berkelanjutan dalam perdagangan kopi global.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan tata kelola Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kintamani berada pada kategori sedang, namun masih mendekati tingkat kesiapan rendah dalam mendukung ekspor. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem tata kelola IG telah memiliki fondasi awal, terutama pada aspek standarisasi mutu dan pengendalian kualitas, namun belum sepenuhnya terintegrasi sebagai sistem *governance* ekspor yang mampu meningkatkan posisi tawar origin secara optimal dalam pasar *specialty coffee global*.
2. Kelemahan utama tata kelola IG Kopi Arabika Kintamani masih terlihat pada aspek pembiayaan rantai pasok berbasis kontrak, transparansi distribusi *premium price*, serta kesiapan *traceability* digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi IG belum sepenuhnya terdistribusi secara adil kepada petani, sementara dukungan pembiayaan dan ketertelusuran produk masih belum cukup kuat untuk memenuhi tuntutan buyer internasional terkait transparansi dan keberlanjutan rantai pasok.
3. Penguatan kelembagaan MPIG sebagai pusat koordinasi ekspor kolektif serta pengembangan kontrak ekspor standar menjadi agenda strategis yang perlu diprioritaskan. Tata kelola IG yang lebih terintegrasi, transparan, dan didukung sistem pembiayaan serta *traceability* digital akan menjadi kunci untuk mendorong upgrading ekspor Kopi Arabika Kintamani secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen di tingkat hulu.

4.2 Saran

1. Penguatan kelembagaan MPIG perlu dilakukan melalui pelembagaan peran sebagai *Export Governance Hub* yang mampu menjalankan fungsi *single gateway* dalam koordinasi ekspor, pengawasan mutu, integrasi *traceability*, serta fasilitasi distribusi nilai tambah yang lebih transparan. Langkah ini diperlukan agar tata kelola IG tidak hanya berfungsi sebagai sertifikasi origin, tetapi berkembang menjadi sistem kolektif yang memperkuat daya saing ekspor dan *trust buyer global*.
2. Penelitian lanjutan perlu mengkaji lebih mendalam dampak penerapan *traceability digital* berbasis lot, kontrak ekspor standar, serta skema *supply chain finance* terhadap peningkatan volume ekspor, stabilitas *premium price*, dan kesejahteraan petani Kopi Arabika Kintamani. Kajian tersebut penting untuk memperkuat agenda kebijakan tata kelola IG



yang lebih operasional dan berbasis bukti dalam mendukung pengembangan kopi specialty Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyati, R. (2025). Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai perlindungan hukum. *Journal of Technology & Management (JTM)*. Link: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1209>
- Anindita, R., & Baladina, N. (2020). Daya saing kopi Indonesia dalam perdagangan internasional dan peluang pasar specialty coffee. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Link: <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa>
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam mendorong perekonomian daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Link: <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/19926>
- Astuti, R., Saptana, & Handayani, S. (2021). Tata kelola indikasi geografis pada komoditas pertanian unggulan di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. Link: <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae>
- Badia-Melis, R., Mishra, P., & Ruiz-García, L. (2015). Food traceability: New trends and recent advances. *Food Control*. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.05.005>
- Barham, E. (2003). Translating terroir: The global challenge of French AOC labeling. *Journal of Rural Studies*. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(02\)00066-8](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00066-8)
- Belletti, G., Marescotti, A., & Touzard, J.-M. (2017). Geographical indications, public goods, and sustainable development. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.04.004>
- Bowen, S. (2010). Embedding local places in global spaces: Geographical indications as a development strategy. *Rural Sociology*. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2009.00007.x>
- Caniato, F., Gelsomino, L. M., Perego, A., & Ronchi, S. (2016). Does finance solve the supply chain funding gap? *Supply Chain Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/SCM-12-2014-0405>
- Dewi, A. A. I. A. P., & Suamba, I. K. (2019). Penguatan kelembagaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani dalam mendukung pemasaran ekspor. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. Link: <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Durand, C., & Fournier, S. (2017). Can geographical indications modernize agriculture and promote rural development? *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.022>
- Galvez, J. F., Mejuto, J. C., & Simal-Gandara, J. (2018). Future challenges on traceability in food: Blockchain and IoT. *Trends in Analytical Chemistry*. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.05.003>
- Gelsomino, L. M., Mangiaracina, R., Perego, A., & Tumino, A. (2016). Supply chain finance: A systematic literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-08-2014-0173>



- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Giovannucci, D., & Ponte, S. (2005). Standards as a new form of social contract in the coffee trade. *Food Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2005.05.007>
- Hartati, A. R. (2016). Analisa risiko rantai pasok kopi dengan pendekatan sistem traceability. *Jurnal Teknik Industri*. Link: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jti/article/view/5066>
- Hidayat, S., & Suryana, A. (2018). Indikasi geografis sebagai instrumen peningkatan daya saing ekspor produk pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Link: <https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id>
- Hofmann, E., & Belin, O. (2011). Supply chain finance solutions: Relevance and research agenda. *Journal of Business Logistics*. <https://doi.org/10.1111/j.0000-0000.2011.01015.x>
- Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading? *Regional Studies*. <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
- Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Sharma, R. (2020). Blockchain technology in food supply chains: A review. *International Journal of Production Research*. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1650979>
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). A handbook for value chain research. *IDRC Working Paper*. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-11717-6>
- More, D., & Basu, P. (2013). Challenges of supply chain finance in global agribusiness. *International Journal of Logistics Systems and Management*. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2013.055632>
- Neilson, J., Wright, J., & Aklimawati, L. (2018). Geographical indications and value capture in the Indonesian coffee sector. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.048>
- Olsen, P., & Borit, M. (2018). The components of a food traceability system. *Trends in Food Science & Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.05.004>
- Pfohl, H.-C., Köhler, H., & Thomas, D. (2011). State of the art in supply chain finance. *Logistics Research*. <https://doi.org/10.1007/s12159-011-0043-3>
- Ponte, S. (2002). The 'Latte Revolution'? Regulation, markets and consumption in the global coffee chain. *World Development*. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00032-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00032-X)
- Regattieri, A., Gamberi, M., & Manzini, R. (2007). Traceability of food products: General framework and experimental evidence. *Journal of Food Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.10.032>
- Schroth, G., et al. (2009). Towards a climate change adaptation strategy for coffee communities. *PNAS*. <https://doi.org/10.1073/pnas.0901033106>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tregear, A., Arfini, F., Belletti, G., & Marescotti, A. (2007). Regional foods and rural development: The role of geographical indications. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2006.09.010>



- Wahyudi, T., & Jati, M. (2012).Challenges of Indonesian coffee competitiveness in specialty markets. *Asian Journal of Agriculture and Development*.<https://doi.org/10.22004/ag.econ.199369>
- Wuttke, D. A., Blome, C., & Henke, M. (2013).Focusing the financial flow of supply chains: Supply chain finance. *International Journal of Production Economics*.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.05.002>